

SOSIALISASI PERAN PERGURUAN TINGGI DAN AKADEMISI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS DALAM PENGUATAN KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN MENUJU KOPERASI MODERN BAGI PELAKU UKM DI SUMATERA UTARA

Ulung Napitu¹⁾, Corry¹⁾, Anggiat Sinurat¹⁾, Tuangkus Harianja¹⁾, Ease Arent²⁾,
Mardiani²⁾, Ade Mey Lisca Nasution²⁾, Hasian Napitu²⁾

¹⁾Dosen Prodi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Simalungun

²⁾Mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah
Pascasarjana, Universitas Simalungun
E-mail : ulungnapitu2018@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to provide an understanding that universities and academics act as business incubators for developing small and medium enterprises. In order to support the growth and development of SMEs, there needs to be a synergy from various parties ranging from academia, industry, and universities as stakeholders. The business incubator is a place used by many developing countries, including Indonesia, as a means of developing new businesses and/or small and medium enterprises (SMEs). The business incubator itself is an institution that oversees a business incubation in the coaching process for small businesses and/or new product development as well as the provision of business facilities and infrastructure, business development, and management and technology support. The availability of skilled labor needed by the Business and Work World (DUKA) is still very low. This is revealed from data from the Central Statistics Agency (BPS) which was announced in February 2020, which was around 13%. This condition is a challenge for universities not to exacerbate this condition by introducing an early work environment to students, so that they can become graduates according to the needs of the job market, either as employees or business owners through student business incubators at universities.

The Business Incubator is a form of Academic Entrepreneurship adapted to the industrial era 4.0 based on the use of electronic media and the internet. To socialize the community service material to SME business actors, the lecture method and question-and-answer method are used for 90 minutes. The results of the socialization have further increased the understanding of the community and SMEs about the importance of developing business incubators as business facilities and infrastructure in business development.

KEYWORDS: *universities, academics, business incubators, economic institutions*

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi adalah suatu institusi ilmiah, dalam melaksanakan pengembangan IPTEK berfungsi sebagai *center of excellence*, *agent of development*, *agent of exchange* dan *problem solving* atas berbagai masalah pembangunan dan fenomena sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan misinya, perguruan tinggi mengaplikasikan hasil kajian ilmiah untuk kepentingan pembangunan dan kemaslahatan orang banyak.

Mengingat sangat strategisnya peran perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat dan pengembangan berbagai institusi termasuk institusi koperasi, perguruan tinggi harus mampu menghasilkan kajian dan berbagai hasil penelitian untuk mengembangkan koperasi di Indonesia menuju koperasi modern. Pada perguruan tinggi sebagai inkubator bisnis juga memiliki berbagai sarana prasarana yang dapat mendukung pengembangan koperasi serta memiliki akademisi dengan berbagai disiplin ilmu. Akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan bersifat multidisipliner mampu memberikan kontribusi keilmuan yang sangat penting untuk mengembangkan perguruan tinggi tersebut sebagai inkubator bisnis dengan tujuan untuk penguatan koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan isi Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan hukum keuangan mikro yang tepat dan sesuai dengan undang-undang tersebut adalah koperasi yang sangat penting untuk dikembangkan.

Setelah didirikan Koperasi tanggal 12 Juli 1960 hingga sampai saat ini “diatas kertas”, koperasi adalah sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Realitasnya koperasi sangat sedikit yang berhasil dan berkembang dengan baik. Mengatasi permasalahan tersebut perguruan tinggi memiliki peran, sarana prasarana dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan sumbangan pemikiran dan sekaligus sebagai *problem solving*. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan perguruan tinggi dan akademisi mampu berperan dalam penguatan koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan menuju koperasi modern yang dicita-citakan.

Keterlibatan Perguruan Tinggi secara langsung dalam aspek kajian Inkubator Bisnis merupakan salah satu bentuk implementasi pelaksanaan misi dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan nasional saat ini dinilai mengarah pada menciptakan "tukang yang baik" bukan "tukang yang kreatif", merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan pengembangan koperasi serta dunia usaha dan dunia industri. Jika sistem pendidikan fokus pada pengembangan kreativitas dan inovasi bukan hanya menghafal pelajaran maka akan melahirkan wiraswastawan yang baik. Langkah yang tepat dilakukan oleh perguruan tinggi adalah sebagai inkubator kegiatan bisnis usaha kecil dan menengah.

Penciptaan inkubator bisnis dalam lingkungan perguruan tinggi dan akademisi merupakan sinergi dari fungsi dan peran perguruan tinggi serta akademisi sebagai wadah mewujudkan sumber daya manusia yang intelek dan profesional. Peran aktif perguruan tinggi untuk membantu fungsi pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor swasta dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh sangat dibutuhkan terlebih untuk mengembangkan koperasi menuju koperasi modern.

METODE

Kegiatan ini untuk mensosialisasikan dan menyampaikan peran perguruan tinggi dan akademisi sebagai inkubator bisnis, dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode ceramah bervariasi yang berlangsung selama 90 menit. Para narasumber secara bergantian menyampaikan materi pengabdian masyarakat secara langsung kepada masyarakat dan narasumber memberikan kesempatan untuk melaksanakan tanya-jawab kepada masyarakat tentang materi yang disampaikan (Vredendregt, 1984). Pemberian kesempatan tanya-jawab kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran perguruan tinggi dan akademisi sebagai inkubator bisnis sebagai sarana pengembangan usaha baru dan atau usaha kecil dan menengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Koperasi di Indonesia

Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini, juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomian berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong royong. Perguruan tinggi memiliki peran yang signifikan dalam membantu tumbuh kembangnya koperasi. Salah satu lembaga yang berperan dalam menumbuh kembangkan koperasi adalah Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi dan Akademisi.

Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Dari ketiga pilar itu, koperasi walau sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang "jalannya paling terseok-seok" dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS. Padahal koperasi selama ini didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia.

Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

Koperasi dicita-citakan sebagai salah satu pelaku ekonomi dan menjadi soko guru perekonomian nasional dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan masyarakat. Kenyataannya, setelah lebih dari tujuh dasawarsa belum banyak yang patut dibanggakan, baik level nasional maupun internasional. Dasawarsa terakhir pemerintah melakukan langkah strategis dengan "reformasi total koperasi" yang dijabarkan melalui tahapan reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan. Reformasi dimulai pada tahun 2014 sebagai upaya mengubah orientasi pengembangan koperasi secara kualitas bukan kuantitas. Koperasi sebagai soko guru masih menjadi "mimpi" yang belum terwujud.

Sampai saat ini citra koperasi belum kunjung membaik, banyak koperasi hanya sekedar papan nama, yang berdiri sekedar memanfaatkan kemudahan persyaratan, banyak koperasi bodong merugikan masyarakat, sehingga koperasi bukan menyejahterakan tetapi menyengsarakan anggota karena gagal membayar simpanan. Koperasi simpan pinjam yang membebani bunga pinjaman tinggi, koperasi bukan sebagai penolong anggota tetapi menjerat anggota dengan bunga yang besar, dan masih banyak lagi keluhan terhadap koperasi.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, ada beberapa faktor penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya pengelolaan yang tidak profesional. Namun demikian hingga kini kementerian masih melakukan pendataan untuk mengetahui hal tersebut. Kementerian terus melakukan pengkajian. Rencananya koperasi yang tidak sehat tersebut akan dipilah sesuai kondisinya. Bila sudah tidak ada pengurusnya, koperasi yang tidak aktif tersebut akan dibubarkan.

Upaya pengembangan koperasi telah banyak dilakukan Pemerintah selain telah melakukan reformasi, pada tahun 2020 pemerintah juga memulai memodernisasi koperasi. Pelaku koperasi berupaya bertahan mengembangkan bisnis koperasi kearah koperasi berskala besar. Koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sekaligus sebagai lembaga sosial, dioperasionalkan dengan prinsip bisnis yang efisien dan mendorong efisiensi bisnis anggotanya menjadi memberi *benefit*. Orientasi bisnis koperasi adalah pelayanan kepada anggota bukan laba. Sebagai lembaga sosial, koperasi berupaya untuk menolong diri sendiri (*self-help*) dengan penuh tanggung jawab.

2. Sistem dan Tujuan Lembaga Ekonomi Kerakyatan

a. Sistem ekonomi kerakyatan

Di dalam buku Politik Ekonomi Kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di perdesaan (Sumawinata, 2004). Menurut Mubyarto (2003), sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Baswir (2008) menyatakan sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memindahkan kedaulatan ekonomi dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat. Swasono menyatakan ciri ekonomi kerakyatan adalah:

- 1) Ketuhanan yang Maha Esa yang artinya ada etika moral yang berasas ketuhanan, bukan berdasarkan materialisme, tetapi berdasarkan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah;
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya ekonomi yang modern atau ekonomi yang non Neo klasikal tidak mengenal kekerasan, penghisaban, ataupun riba;
- 3) Persatuan berdasar sosio nasionalisme yang artinya ekonomi berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan tidak saling mematikan;
- 4) Kerakyatan berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, dan;
- 5) Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya kemakmuran rakyat yang utama.

Ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993). Ekonomi kerakyatan adalah tatalaksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada amanat konstitusi nasional, sehingga landasan

konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur (terkait dengan) perikehidupan ekonomi nasional yaitu: Pancasila (Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Persatuan, Sila Kerakyatan, dan Sila Keadilan Sosial).

b. Nilai-nilai dasar sistem ekonomi kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila (Mubyarto, 2003) yang nilai-nilai dasarnya sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan, di mana "roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral"
- 2) Kemanusiaan, yaitu: "pemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial".
- 3) Kepentingan nasional (nasionalisme ekonomi), di mana "nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri".
- 4) Kepentingan rakyat banyak (demokrasi ekonomi): "demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat".
- 5) Keadilan sosial, yaitu: "keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

c. Ciri sistem ekonomi kerakyatan

- 1) Peranan vital negara (Pemerintah).
- 2) Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan
- 3) Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja sama (kooperasi).
- 4) Pemerataan penguasaan faktor produksi
- 5) Koperasi sebagai soko guru perekonomian
- 6) Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh majikan.
- 7) Kepemilikan saham oleh pekerja

d. Tujuan dan sasaran ekonomi kerakyatan

Tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

- 1) Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
- 2) Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- 3) Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
- 4) Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
- 5) Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

3. Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan dan masyarakat selalu menghadapi persoalan yang bersifat ekonomi, mengharuskannya memikirkan dan membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Tujuan dari ekonomi kerakyatan, diantaranya untuk membangun negara yang berdikari secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta memiliki kepribadian yang berkebudayaan, mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.

Kelebihan sistem ekonomi berbasis kerakyatan diantaranya rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian; dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata; sistem ekonomi ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat; dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat

sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan; transaksi antara produksi, distribusi dan konsumsi sangat baik, serta hubungan antara produksi, distribusi dan juga konsumsi akan saling membutuhkan dan sangat baik.

Ekonomi kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan menginginkan kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi memiliki peranan dalam ekonomi kerakyatan karena Koperasi merupakan bentuk perusahaan.

4. Pengembangan Inkubator Bisnis

Setyobudi, mengatakan bahwa Konsep INBIS ini pada dasarnya meniru konsep "kelahiran" yang membangun usaha mulai dari lahirnya usaha (*hatched*). Kemudian dibesarkan sampai dengan cukup kuat untuk dilepas menjadi mandiri, yang dalam terminologi INBIS dinyatakan dengan istilah *Graduates*. Inkubator bisnis dirancang untuk membantu pelaku bisnis mewujudkan bisnisnya terutama pada masa sulit ditahun-tahun permulaan usaha. Bantuan tersebut dapat dalam bentuk yang beragam kegiatan mulai dari konsultasi manajemen dan teknik usaha, menyusun jemaring bisnis sampai dengan layanan fasilitas manajemen perkantoran. Pengalaman menunjukkan bahwa kurang dari 10% *tenant* mengalami kegagalan usaha ditingkat inkubator. Data di Inggris memperlihatkan bahwa 80% perusahaan yang menjalani proses *Inbis* ternyata lebih berhasil dibandingkan hanya 33% yang tidak pernah menjalani *Inbis*. Hal tersebut di evaluasi pada 5 tahun setelah perusahaan lepas dari *Inbis*.

Tujuan utama inkubator bisnis adalah menghasilkan perusahaan yang mandiri terutama dalam aspek finansial. Perusahaan yang telah berhasil lulus dari inkubator bisnis memiliki potensi bermacam-macam antara lain dalam hal penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, komersialisasi teknologi, diversifikasi sumberdaya ekonomi, revitalisasi SDM, investasi

modal usaha, peluang peningkatan peranan wanita sebagai pelaku bisnis, dan berakhir pada pemberdayaan ekonomi lokal serta nasional.

Inkubator bisnis saat ini telah meluas keseluruh dunia yang keberadaannya terwakili dalam NBIA. Dewasa ini terdapat 3.950 *Inbis* yang berada di 68 negara di seluruh dunia yang telah memberikan manfaat antara lain menyediakan lapangan kerja dan investasi yang tidak terhitung lagi melalui berbagai program dan fasilitasnya bagi masyarakat. Inkubator bisnis saat ini telah dapat diterima di seluruh dunia, misalnya di Australia, China, UK, Korea Selatan, dan USA sendiri. Model program Inkubator bisnis saat ini telah menjadi institusi yang sangat dihormati keberadaannya dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di lingkungan regional ASEAN baru tiga negara yang telah mengadopsi konsep *Inbis* dalam mengembangkan perekonomiannya yaitu Thailand, Malaysia dan Singapur. Inkubator bisnis di perguruan tinggi pada prinsipnya merupakan katalisator proses mulai dari awalan dan pertumbuhan suatu usaha. Peranan *Inbis* di perguruan tinggi dapat terlihat melalui penyediaan jasa konsultan kewirausahaan, jaring layanan dan fasilitas peralatan yang dibutuhkan oleh usahawan untuk mendukung keberhasilannya. Suatu pengalaman di Amerika Utara membuktikan bahwa *Inbis* pada tahun 2001-2004 mampu membantu lebih dari 35.000 perusahaan dengan 82.000 tenaga kerja tetap dan mampu menumbuhkan pendapatan lebih dari 7 miliar dolar Amerika.

Inkubator bisnis di Louisiana State University (LSU) ini ternyata mampu menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan negara bagian Louisiana, terutama dalam membantu pengusaha merencanakan pengembangan wirausahanya. Melalui tiga strategi layanannya yaitu inkubator, bantuan teknis kepada pengusaha kecil dan alih teknologi. IBTC telah melayani 5.691 permohonan informasi dan bantuan teknis, membantu lebih dari 353 usaha yang memberi 8.061 lapangan kerja dengan lebih dari \$ 63 juta dalam bentuk proyek, pinjaman, hibah bagi klien bisnisnya. Kerja sama yang dinamis tersebut menempatkan LSU sebagai yang terdepan dalam layanan masyarakat dalam dua tahun terakhir (Forbes.com). Mengacu pengalaman pada NBIA untuk kondisi di USA, perusahaan baru dilepas dari inkubator setelah memiliki penghasilan sebesar USD 2-3 juta per tahun.

Di Korea Selatan, 11 inkubator bisnis baru berdiri pada tahun 1997 sebagai respons terhadap terjadinya krisis ekonomi pada saat itu dan pada

tahun 2003 telah tumbuh menjadi 291 buah. *Inbis-inbis* tersebut terutama didirikan di perguruan tinggi dan lembaga penelitian diseluruh negeri. Lembaga inkubator bisnis tersebut dalam perkembangannya menjadi jemaring yang menghubungkan antara dunia usaha dengan pemerintah daerah dan dapat menjamin keseimbangan pembangunan antar regional. Dewasa ini 291 *inbis* di Korea Selatan mengakomodasi 4.000 perusahaan dibidang Teknologi Informasi (IT), menciptakan 20.000 lapangan kerja yang mampu menghasilkan pendapatan sebesar 930 M won. Selain itu *Inbis* juga mampu melindungi 3.909 hak kekayaan intelektual termasuk didalamnya 1.181 telah di patenkan. Diantara perusahaan tersebut 254 buah atau 6,4% bergerak dibidang perdagangan luar negeri yang dibina oleh Inkubator bisnis telah berhasil mengekspor senilai 91,9 miliar won.

5. Peran Perguruan Tinggi dan Akademisi sebagai Inkubator Bisnis dalam Penguatan Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan Menuju Koperasi Modern

Ciputra (2007) menyebut kampus adalah agen penting perubahan masa depan bangsa. Kampus memiliki peran yang tak tergantikan dalam menciptakan budaya wirausaha di Indonesia dan sebagai pembentukan dan pelatihan entrepreneur baru, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Kampus adalah terminal utama generasi muda terdidik untuk masuk dalam pasar kerja, artinya masa perguruan tinggi adalah kesempatan terakhir untuk memastikan para lulusan lembaga pendidikan sebagai warga negara yang mandiri secara finansial.
- b. Kampus adalah tempat terbaik untuk melaksanakan pembangunan sumber daya manusia. Setiap orang yang datang ke kampus dan menjadi warga kampus telah menjadi pola pikir untuk belajar dan telah mengonsentrasikan sebagian waktu hidupnya untuk belajar dan meningkatnya kualitas dirinya.
- c. Kampus memiliki sumber daya manusia pendidik, para ahli yang memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi generasi muda.

Supangkat, dkk (2005) menjelaskan bahwa konsep inkubator bisnis di perguruan tinggi berpotensi besar untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru melalui program inkubator bisnis sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas dari penelitian dan pengabdian masyarakat diharapkan mampu mengubah penemuan-penemuan menjadi inovasi sehingga terjadi proses penciptaan nilai. Melalui proses tersebut,

diharapkan akan ada dampak positif yang akan muncul yaitu komersialisasi teknologi yang mampu mendorong penciptaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social wealth creation and social wealth improvement*). Musanto (2004) menjelaskan lebih lanjut tentang peran perguruan tinggi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, yaitu :

- a. Perguruan tinggi memiliki fasilitas laboratorium yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
- b. Perguruan tinggi memiliki fakultas-fakultas dari berbagai disiplin ilmu (spesialisasi) yang dapat dimanfaatkan untuk studi pengembangan pembinaan dari berbagai aspek sesuai dengan kasus yang dihadapi.
- c. Perguruan tinggi merupakan organisasi non profit yang memiliki visi kuat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Tri Darma Perguruan Tinggi.
- d. Perguruan tinggi memiliki cukup banyak mahasiswa yang dapat dikerahkan melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti KKN, bakti sosial dan lain-lain untuk menunjang kegiatan PT dalam melaksanakan kegiatan konsultasi.
- e. Lembaga inkubator bisnis yang berada dibawah pengelolaan perguruan tinggi dapat menjawab empat kebutuhan kerja di era globalisasi dewasa ini (Novel, 2001) yaitu: kebutuhan akan pekerjaan yang menantang dan memiliki arti penting bagi organisasi. Yang dimaksud dengan pekerjaan menantang adalah pekerjaan yang tidak mudah untuk diselesaikan tetapi mungkin untuk diselesaikan, sedangkan pekerjaan yang memiliki arti penting bagi organisasi adalah pekerjaan yang memberikan sumbangan/kontribusi yang berharga bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Perguruan Tinggi di luar negeri banyak yang dapat menjadi contoh yang tepat betapa penting peranannya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan institusi pertumbuhan ekonomi terutama di areanya. Bidang-bidang bioteknologi, elektronika (telepon mobil), agrobisnis, dan *aerospace* serta farmasi akan menjadi aspek kompetisi dimasa depan. Oleh karena, itu penting artinya bahwa kurikulum IPTEK harus dibangun dengan mengarah ke aspek ekonomi atau memiliki visi berorientasi bisnis.

Peluang tersebut ada disetiap perguruan tinggi sejalan dengan perubahan dunia, sehingga sistem pembelajaran harus mampu mendorong mahasiswa untuk memiliki jiwa kewirausahaan, keterampilan dan senantiasa mampu berinovasi. Berbasis pada pemikiran tersebut, kurikulum

di perguruan tinggi hendaknya dapat senantiasa bersifat fleksibel dan dinamik menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis paling tidak dikawasannya.

Perguruan tinggi, sekaligus yang berfungsi sebagai *science parks and incubators* terbukti menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi pada abad 21 ini terutama dalam peranannya sebagai pengarah, penemu dan proses perwujutannya hingga menjadi produk yang sehat serta aman terhadap masyarakat dan lingkungannya. Inkubator bisnis di perguruan tinggi adalah langkah awal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut karena membantu kita untuk mewujudkan ambisi menjadi kenyataan dan meningkatkan kemampuan berinovasi.

Inkubator bisnis di perguruan tinggi paling tidak secara umum akan memberikan dua area manfaat yaitu pertama terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui bertambah banyaknya basis-basis perekonomian dan lapangan kerja. Sedangkan terhadap pertumbuhan pengusaha kecil yang berpotensi melalui upaya bantuan teknis agar dapat bertahan dan bertumbuh dalam pemasarannya. Namun demikian perlu disadari bahwa hasil inkubator adalah bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan segera, sebagai contoh adalah lapangan kerja baru akan tersedia setelah suatu usaha menunjukkan keberhasilannya.

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat tujuh inkubator bisnis di perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hasanuddin, Universitas Mataram, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Udayana, Universitas Negeri Sebelas Maret, dan Universitas Brawijaya (UB). Organisasi inkubator bisnis dalam perguruan tinggi yang telah berjalan dalam negeri sangat beragam tingkat kemajuan dan modelnya yang semua itu dipengaruhi oleh visi dan misinya. Walaupun secara tegas belum semuanya berbentuk *Inbis*, namun secara umum mereka memiliki kesamaan yaitu ingin membantu masyarakat kampus maupun sekitarnya dalam mengembangkan usahanya. Khusus untuk masyarakat kampus selain sebagai laboratorium lapangan untuk belajar bisnis juga merupakan persiapan dalam menghadapi otonomi perguruan tinggi.

Inkubator bisnis sebenarnya bukan program baru di Indonesia, namun mengalami banyak kendala dalam eksistensinya. Saat ini pemerintah telah membuat payung hukum tentang pelaksanaan inkubator bisnis atau wirausahawan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Terakhir dibuat Peraturan

Menteri Koperasi dan UKM nomor 24 tahun 2015 tentang NSPK Inkubator Wirausaha. Inkubator bisnis berperan sebagai lembaga pendamping dan perantara yang akan membantu para pelaku UKM yang dibina agar risiko kegagalan bisnis dapat diminimalisir, memperoleh akses pasar dan mendukung dalam hal inovasi produk yang baik.

Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi mediator UKM pada pemerintah dan lembaga keuangan dalam rangka peningkatan produktivitas UKM melalui upaya pembentukan keterkaitan. Saat ini ada perguruan tinggi yang sudah menjalin kemitraan dengan pihak perguruan tinggi dapat memanfaatkan Inkubator bisnis sebagai penelitian dari para dosen untuk kepentingan publik. Adanya inkubator bisnis di kampus akan membantu program kewirausahaan dikalangan mahasiswa.

Perguruan tinggi dan akademisi memiliki peran penting dan strategis dalam penciptaan inkubator bisnis dari kalangan mahasiswa maupun dari stakeholder lainnya. Pendekatan inkubasi sangat penting agar anak muda dapat diajak dari awal dan mendapatkan bimbingan serta wawasan untuk menjadi wirausaha termasuk merumuskan bisnis plan. Mereka harus ditempah untuk dapat menjadi pengusaha dan dibantu agar bisa dengan mudah mengakses skema pembiayaan, pasar, dan digitalisasi. Melalui perguruan tinggi akan banyak wirausaha muda yang berbasis digital dan para kreator UKM yang lahir di masa depan.

Inkubator bisnis memiliki hubungan yang kuat dengan Tri Dharma perguruan tinggi karena inkubator bisnis dapat berfungsi sebagai sarana praktik dari konsep-konsep bisnis akademik. Selain itu, inkubator bisnis memiliki arti sosiologis yaitu media interaksi antar unit dan lembaga lain yang berada di bawah pengelolaan perguruan tinggi memiliki nilai strategis dalam mengaplikasikan konsep *link and match*, yang berdampak pada peningkatan sistem pembelajaran, persepsi, efektivitas organisasi dan penciptaan sinergi. Kehadiran lembaga inkubator bisnis dalam lingkungan bisnis merupakan sinergi antara kalangan praktisi bisnis dengan kalangan akademisi terhadap perkembangan lingkungan strategis, khususnya perubahan tuntutan dan perilaku. Secara moral, inkubator bisnis merupakan aplikasi dari sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan "semangat koperasi". Keterikatan para anggota inkubator bisnis sama seperti koperasi. Perbedaannya terletak pada simpanan atau iuran. Pada lembaga inkubator bisnis, anggota tidak membayar simpanan atau iuran.

Perguruan tinggi dan lembaga profesi (konsultan manajemen dan bisnis) harus berperan sebagai *agent of expertise* bagi UKM, yakni mencetak para lulusannya untuk dididik dan dibekali tentang ilmu dan pengetahuan manajerial UKM. Mereka mungkin minim pengalaman kewirausahaan, namun dengan diadakannya program magang, pelatihan pendampingan, dan pembekalan melalui *training soft skill*, akan mampu meningkatkan kompetensi mereka sebagai konsultan junior.

Akademisi dibutuhkan peran dan perhatiannya guna pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia. peran sivitas akademika khususnya dosen melalui pemikiran yang dituangkan dalam media ilmiah, yakni Infokop serta Jurnal Koperasi dan UMKM. Lewat karya ilmiah, dapat membantu masyarakat memahami koperasi dan UMKM. "Akademisi universitas perlu bersinergi membangun koperasi dan UMKM melalui karya ilmiahnya. Sebab, selama ini terkesan ada jarak, dengan kata lain informasi tidak nyambung ke masyarakat. Padahal membangun itu tidak hanya peran pemerintah saja melainkan harus melibatkan semua pihak tanpa terkecuali. Apabila perguruan tinggi dan akademisi dapat berperan aktif dalam memberikan ide dan pengembangan koperasi di Indonesia maka koperasi dapat menjadi koperasi modern dengan digitalisasi dan sebagai lembaga keuangan yang dilakukan secara profesional dan akuntabel.

6. Pengembangan Koperasi Menjadi Koperasi Modern

Koperasi hingga saat ini terus berkembang dan menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Hal ini tercermin dari data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) tahun 2020 yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Kemkop UKM memiliki enam strategi guna mewujudkan koperasi modern. Keenam strategi tersebut yakni pengembangan koperasi multi pihak, fokus pengembangan sektor riil, kemitraan, pembiayaan, amalgamasi dan digitalisasi. Dijelaskannya, koperasi harus mampu meningkatkan jumlah anggota. Selain itu, memodernisasi koperasi menjadikan koperasi sektor riil memiliki daya ungkit perekonomian. Digitalisasi koperasi menjadi strategi terakhir untuk memodernisasi koperasi. Era digital menuntut koperasi juga harus berdigitalisasi dalam bisnis prosesnya. Digitalisasi sangat penting guna meluaskan skala usaha dan efisiensi.

KESIMPULAN

1. Perguruan tinggi dan lembaga profesi (konsultan manajemen dan bisnis) harus berperan sebagai *agent of expertise* bagi UKM, yakni mencetak para lulusannya untuk dididik dan dibekali tentang ilmu dan pengetahuan manajerial UKM.
2. Akademisi dibutuhkan peran dan perhatiannya guna pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia serta akademisi universitas perlu bersinergi membangun koperasi dan UMKM melalui karya ilmiahnya.
3. Peran perguruan tinggi sebagai inkubator bisnis dalam penguatan koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan sangat penting karena :
 - a. Perguruan tinggi memiliki fasilitas laboratorium yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
 - b. Perguruan tinggi memiliki fakultas-fakultas dari berbagai disiplin ilmu (spesialisasi) yang dapat dimanfaatkan untuk studi pengembangan pembinaan dari berbagai aspek sesuai dengan kasus yang dihadapi.
 - c. Perguruan tinggi merupakan organisasi non profit yang memiliki visi kuat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Tri Darma perguruan tinggi.
 - d. Perguruan tinggi memiliki cukup banyak mahasiswa yang dapat dikerahkan melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti KKN, Bakti Sosial dan lain-lain untuk menunjang kegiatan PT dalam melaksanakan kegiatan konsultasi.

SARAN

1. Perguruan tinggi sebagai agen penting perubahan masa depan seharusnya mampu menciptakan wirausaha dan entrepreneur baru.
2. Dengan fasilitas yang dimiliki, perguruan tinggi sebaiknya memanfaatkan hal tersebut dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. Perguruan tinggi harus lebih responsif terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan potensi generasi muda.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Tri Siwi. 2011. Peran Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Dalam Meminimalkan Resiko Kegagalan Bagi Wirausaha Baru Pada Tahap Awal(Start Up). Bandung: Universitas Airlangga
- Baumassepe, Nur Andi. 2018. Sinergi Demi Inkubator Bisnis. Majalah Marketeers, Edisi Juli hal. 34-35
- BeritaSatu.com. 20 Februari 2021. Perguruan Tinggi Harus Jadi Inkubator Bisnis. Diakses pada 20 November 2021

- Hadiyati Ernani. 2010. Implementasi Misi Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Pendekatan Inkubator Bisnis. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. 20 Februari 2021. Jadikan Perguruan Tinggi Sebagai Inkubator Bisnis, Menkop UKM Optimis Akan Masa Depan Wirausaha Muda. Diakses pada 20 November 2021
- pipnews.co.id. 21 November 2021. Peran Perguruan Tinggi Diperlukan Untuk Kembangkan Koperasi. Diakses pada 22 November 2021. <https://pipnews.co.id/daerah/peran-perguruan-tinggi-diperlukan-untuk-kembangkan-koperasi/>
- Baswir, Revrison, 1995, Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, dalam Baswir, 1997, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mubyarto, 1979, Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 19 Maret 1979)
- _____, 2003, Ekonomi Pancasila: Satu Renungan Akhir Tahun. Makalah Seminar Bulanan.
- Musanto, Trisno., 2004, Peran Pro-Aktif Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Desa Binaan, Artikel, Majalah Ekonomi Universitas Airlangga, Tahun XIV, No.3, Desember, Surabaya
- Novel, Dean, 2001, Inkubator Bisnis Sebagai Salah Satu Sarana Pewujud Misi Perguruan Tinggi, Makalah, Dipresentasikan pada Seminar Kewirausahaan Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Jakarta, 15 Mei 2001.
- Panggabean, Riana, 2005, Profil Inkubator dalam Penciptaan Wirausaha Baru, diunduh dari jurnal smecda, www.smecda.co.id
- Setyobudi, L. INKUBATOR BISNIS DI PERGURUAN TINGGI. Article
- Sri Edi Swasono, Ekonomi Kerakyatan. Lembaga Suluh Nusantara
- Syahputra, Rinaldi. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA
- Supangkat, Suhono Harso Dr., Sigit Purwanto, 2008, Membangun Jaringan Kerjasama Untuk Pendidikan Entrepreneur, Makalah, dipresentasikan pada Seminar & Expo Innovative Indonesian Entrepreneurship Education : How To Develop and Delivet It, Prasetya Mulya Business Scholl, 8-9 Juli, Jakarta